

V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PAD tidak selalu diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya DAU maka akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021.
3. Dana Alokasi Umum (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya DAK maka akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan DBH tidak selalu diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021.
5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin

meningkatnya PDRB maka akan menurunkan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021.

6. PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Variabel PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal sebesar 82 persen sedangkan sisanya 18 persen dipengaruhi oleh variabel lain.

B. Implikasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini, maka implikasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Melihat adanya pengaruh yang tidak signifikan dari PAD terhadap belanja modal, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan penggalan sumberdaya yang memberikan kontribusi terhadap PAD. Hal ini bisa dilakukan dengan cara intensifikasi maupun ekstentifikasi pajak, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak atau retribusi daerah dengan peningkatan efisiensi sistem pemungutan maupun pengelolaan pajak atau retribusi daerah.
2. Melihat adanya pengaruh yang signifikan dari DAU dan DAK terhadap belanja modal, maka pemerintah daerah sebaiknya lebih meningkatkan anggaran DAU dan DAK yang dialokasikan ke anggaran belanja modal, untuk membiayai pengeluaran pemerintah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik.

3. Melihat adanya pengaruh yang tidak signifikan dari DBH terhadap belanja modal, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan penggalian sumber penerimaan yang dihasilkan dari DBH Pajak dan SDA, terutama penerimaan dari cukai hasil tembakau yang memiliki kontribusi cukup besar. Hal ini dapat dilakukan dengan perbaikan mekanisme pelayanan dan pengawasan untuk mencapai target penerimaan DBH yang lebih besar.
4. Melihat adanya pengaruh yang signifikan dari PDRB terhadap belanja modal, maka pemerintah daerah sebaiknya lebih banyak mengalokasikan pendapatan daerah dalam bentuk belanja modal guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta meminimalisir belanja rutin yang tidak perlu. Pengeluaran pemerintah daerah, khususnya belanja modal harus lebih difokuskan pada sektor-sektor yang mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

C. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian ini, diantaranya; data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan dan mengawasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan; data pada *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan belum disajikan dalam bentuk tabel, data di *input* satu-satu secara manual sehingga dimungkinkan adanya kesalahan dalam pengetikan; jurnal atau artikel yang membahas pengaruh PDRB terhadap Belanja Modal masih sedikit sehingga pembahasannya kurang mendalam.